

Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial dan Keagamaan pada Masa Pemilu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Training on Early Detection of Social and Religious Conflicts During the Election Period in Kerinci District and Sungai Penuh City

M. Nurzen S. *

Al Amin Hadi

Hadi Candra

Mahmud Hibatul Wafi

Faculty of Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

email: nurzen255@gmail.com

Kata Kunci

deteksi konflik
Pemilihan Umum
Bawaslu
konflik sosial

Keywords:

conflict detection
General Election
Bawaslu
social conflict

Received: February 2024

Accepted: April 2024

Published: June 2024

Abstrak

Deteksi dini konflik merupakan proses penting dalam pencegahan konflik untuk menghindari keadaan lebih kompleks di masyarakat. Aktivitas politik yang bernuansa kompetitif sangat berpotensi memicu pembelahan sosial dan konflik lebih luas. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit bagi konflik sosial keagamaan yang diakibatkan oleh proses politik. Pengabdian ini dilakukan melalui format pelatihan dan pendampingan bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta melibatkan stakeholder terkait seperti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepolisian Resor (Polres), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Para peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan memberikan refleksi. Secara kualitatif, pelatihan ini telah berdampak positif terhadap wawasan, sikap, dan keterampilan peserta dalam menganalisis dan mendeteksi konflik di masyarakat. Peserta mendapatkan wawasan yang mendalam tentang konsep deteksi dini konflik dan metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi potensi konflik sebelum mencapai tingkat eskalasi yang lebih tinggi. Dari segi sikap, pelatihan ini mampu membentuk mentalitas positif dan sensitivitas terhadap isu konflik, memperkuat nilai-nilai perdamaian, serta mendorong peserta untuk mengadopsi sikap proaktif dalam upaya pencegahan konflik. Terakhir, melalui studi kasus dan simulasi memberikan peserta keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal konflik serta mengembangkan strategi penanganan yang tepat.

Abstract

The early detection of conflict is a crucial process in conflict prevention to avoid more complex situations in society. Politically competitive activities have the potential to trigger social division and broader conflicts. This community service initiative aims to provide concrete solutions for religious-social conflicts resulting from the political process. The initiative is implemented through training and mentoring for members of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in Kerinci District and Sungai Penuh City, involving relevant stakeholders such as the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), Regional Police (Polres), and the Forum for Interfaith Harmony (FKUB). Participants in the training displayed high enthusiasm by actively participating in Q&A sessions, group discussions, presentations, and providing reflections. Qualitatively, the training has positively impacted participants' insights, attitudes, and skills in analyzing and detecting conflicts in society. Participants gained in-depth knowledge of the concept of early conflict detection and methods to identify potential conflicts before reaching higher levels of escalation. In terms of attitude, the training was effective in shaping a positive mindset and sensitivity to conflict issues, reinforcing peace values, and encouraging participants to adopt a proactive approach to conflict prevention efforts. Finally, through case studies and simulations, participants acquired the necessary skills to identify early signs of conflict and develop appropriate handling strategies.



PENDAHULUAN

Konflik sosial-keagamaan telah menjadi fenomena lazim di masa Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sering kali menjadi momen yang menegangkan dan memicu konflik di masyarakat, terutama di masyarakat yang memiliki keragaman agama dan budaya. Faktor yang dapat memicu konflik sosial-keagamaan selama pemilu di setiap daerah bisa beragam, di antaranya disebabkan oleh 1) ketatnya persaingan politik yang dapat memicu polarisasi di antara kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang berbeda (Qodir *et al.*, 2022); 2) penggunaan isu-isu keagamaan dan identitas (Hanan, 2020; Frenki, 2021; Lesmana & Sutrisno, 2021), sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan politik dan memobilisasi massa untuk terlibat dalam konflik; 3) manipulasi informasi, penyebaran berita palsu, hoaks, atau propaganda politik yang negatif terkait dengan kelompok agama atau sosial tertentu dapat memicu konflik dan kekerasan (Hui, 2020).

Konflik sosial keagamaan yang terjadi selama pemilihan umum di Indonesia sangat merugikan masyarakat dan negara. Konflik tersebut dapat menghambat proses demokratisasi dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perhatian dan aksi konkrit terhadap persoalan ini menjadi penting dalam rangka mengelola keragaman dan keutuhan bangsa. Sejauh ini perhatian akademik terhadap konflik sosial di tahun politik lebih menekankan pada resolusi konflik daripada mitigasi atau deteksi dini konflik. Keterlambatan dalam mendeteksi konflik menyebabkan lemahnya antisipasi dalam menghadapi konflik terbuka di masyarakat, terutama di daerah. Studi-studi yang ada lebih banyak terfokus pada penyelesaian konflik sosial daripada deteksi dini konflik (Herman, 2017; Harish & Toha, 2019; Rinaldi, 2022). Selain itu, hubungan konflik sosial dengan kesejahteraan ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, bencana alam, dan pengelompokan kelompok etnis, juga masih minim perhatian.

Studi-studi terdahulu tentang resolusi dan deteksi konflik di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dipandang memiliki siasat budaya yang bisa dijadikan solusi bagi konflik yang terjadi di masyarakat (Astri, 2012; Surjo & Qodir, 2013; Halim & Pahrudin, 2019; Prasajo & Pabbajah, 2020; Diab *et al.*, 2022). Pendekatan kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan Diab *et al.* 2022 dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik masyarakat. Akomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik dinilai mampu membangun persatuan dalam heterogenitas perbedaan budaya, agama, dan etnis. Oleh karena itu, akomodasi budaya dengan nilai-nilai lokal perlu diakomodir dalam penyelesaian konflik sosial. Secara umum, penelitian tentang topik ini menyarankan perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap potensi kearifan lokal di setiap daerah sebagai resolusi konflik.

Sedangkan studi-studi yang berkaitan dengan konflik sosial dan Pemilihan Umum lebih cenderung menempatkan fokus pada penyelesaian konflik daripada pendeteksian (Amirullah & Agggariani, 2022; Andriyani *et al.*, 2022; Rinaldi, 2022). Potensi konflik di musim Pemilu seringkali tidak disertai dengan agenda deteksi dini yang matang. Karenanya, sebagaimana dikemukakan Andriyani dkk. dalam penelitiannya bahwa eksploitasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), intimidasi, penghinaan, dan penyebaran foto-foto dan video yang bersifat agitatif, turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat keparahan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Dalam kondisi demikian, upaya penguraian konflik semakin kompleks dan perlu proses yang panjang karena tingkat konflik sudah terlanjur kompleks.

Ada beragam paradigma dan perspektif dalam memandang konflik. Pertama, perspektif psikologis. Dalam perspektif ini konflik sering dipandang sebagai "sebuah keadaan ketidaksesuaian yang menyangkut kelompok-kelompok karena merasa terancam dalam mengejar hajat hidup dan keinginannya." Berdasarkan perspektif ini konflik umumnya dipandang sebagai sebuah gesekan (*clash*) atau pertikaian antar person dan pihak atau kultur yang mempunyai perbedaan pemikiran, kultur atau aktivitas sosial yang berlainan. Perspektif semacam ini umumnya dikenal dengan istilah behavior analysis model. Kedua, perspektif sosiologis. Perspektif ini pada biasanya memandang konflik diakibatkan oleh adanya suatu pola atau relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang terjadi dalam suatu proses sejarah. Pola dan relasi kekuasaan itu bisa berupa sistem ekonomi, budaya, dan sosial-politik. Pada dasarnya, konflik bukanlah sesuatu yang hampa, namun dalam konflik terdapat komponen adanya praktik-praktik untuk menghapus pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai sesuatu yang diperebutkan. Komponen ini yang menjelaskan perbedaan antara konflik dan sengketa.

Sengketa terjadi jika dua orang atau dua kelompok (bisa lebih) berkompetisi satu sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu objek atau posisi yang sama. Jadi, melalui definisi ini terlihat jelas bahwa konflik cenderung memberi dampak negatif bagi pihak tertentu (Cewers, 2012).

Teori resolusi konflik digunakan dalam tulisan ini untuk menuntun dan mensistematisasi kerangka kerja pengabdian yang dilakukan. Beberapa pijakan teoritis berkenaan dengan resolusi konflik misalnya, Peter (2002) memahami resolusi konflik sebagai situasi dimana para kelompok yang bertikai melakukan perjanjian atau kesepakatan yang dapat memecahkan ketegangan, saling menerima keberadaan satu sama lain dan menandaskan segala aktivitas kekerasan. Resolusi konflik juga dipahami sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang disepakati dan dilakukan secara kolektif (Deutsch *et al.*, 2006). Fisher (2001) sebagai tokoh penting dalam tema ini menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan upaya-upaya mengatasi sebab-sebab konflik dan berusaha menciptakan hubungan baru yang bisa berlangsung lama di antara pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya, menurut Killen *et al.* (2000), resolusi konflik ialah suatu upaya menemukan solusi untuk menuntaskan dua perbedaan atau lebih dengan memprioritaskan pembangunan sosial dan moral yang membutuhkan kecakapan dan kelihaihan untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Senada dengan yang diutarakan (Waisová, 2015) bahwa resolusi konflik dipandang sebagai kondisi sosial, di mana para kelompok yang berseteru dalam konflik secara sadar dan sukarela mengambil keputusan untuk hidup bersama secara damai atau untuk memecahkan akar masalah ketidaksesuaian kepentingan mereka sehingga pertikaian dapat diselesaikan.

Kegiatan pengabdian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dua kabupaten-kota ini berada di wilayah administrasi Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh beberapa kali masuk ke wilayah rawan konflik di ajang Pemilu. Berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2020, Kota Sungai Penuh menduduki posisi pertama daerah kerawanan tertinggi untuk kategori kabupaten/kota. Indikator tingkat kerawanan dilihat dari konteks politik dan sosial, seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kecurangan penyelenggara Pemilu, politik uang, bencana alam, dan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu. Berdasarkan laporan akhir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sungai Penuh tahun 2020 ditemukan 41 kasus, diregistrasi 22 kasus dan tidak diregistrasi 19 kasus (Bawaslu Sungai Penuh, 2020). Fakta ini menjadi alasan utama giat pengabdian ini dilakukan guna memberikan solusi konkrit untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan damai.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit bagi konflik sosial keagamaan yang diakibatkan oleh pemilihan umum di tingkat daerah. Konflik sosial membuka peluang bagi perpecahan di masyarakat, yang merupakan ancaman bagi sistem demokrasi dan persatuan bangsa. Selain itu, pengabdian ini juga berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perdamaian selama pemilu dan bagaimana mencegah terjadinya konflik, serta memberikan pelatihan bagi anggota Bawaslu dalam memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mengatasi perbedaan yang muncul.

METODE

Metode yang digunakan dalam giat pengabdian ini ialah *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah sebuah metode pengabdian yang melibatkan partisipasi aktif dari para peserta atau stakeholder dalam proses pengabdian. Metode ini bertujuan untuk mencapai perubahan sosial yang positif melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antara tim dan partisipan (Afandi *et al.*, 2022). Adapun pendekatan yang digunakan ialah *The Training Cycle*. Tahapan dalam kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*). Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh mitra dan peserta pelatihan. Pada tahap ini, tim bekerja sama dengan mitra untuk merumuskan permasalahan, menentukan tujuan dan target, serta merancang pendekatan pelatihan yang akan dilakukan.
2. Tindakan (*Action*). Tim berkejasama dengan mitra (Bawaslu Kerinci dan Sungai Penuh) melaksanakan pelatihan deteksi dini konflik. Pelaksanaan pelatihan direncanakan selama 2 hari atau 15 JP (Jam Pelajaran) dan peserta sebanyak 30 orang. Pelatihan bertempat di Gedung Pertemuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Tindak Lanjut. Para peserta didampingi tim melakukan praktik langsung di tengah masyarakat, berupa jajak pendapat, pendalaman isu, mapping stakeholders, dan menetapkan pendekatan deteksi atau mitigasi konflik. Terakhir, masing-masing peserta mempresentasikan temuan yang diperoleh secara bergantian.
4. Evaluasi (*Evaluation*). Evaluasi kegiatan dilakukan dalam bentuk pre-test (di awal sesi) dan post-test (di akhir sesi), dan mendengarkan tanggapan peserta secara langsung terkait pelatihan baik dari segi fasilitas, panitia dan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Analisis Strategi

Pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari, 20-21 Desember 2023, yang bertempat di Gedung Pertemuan Fakultas Syariah IAIN Kerinci. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa elemen penting di masyarakat yang memiliki andil baik secara langsung maupun tidak dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Keterlibatan berbagai pihak ini menambah informasi mutakhir tentang perkembangan aktivitas politik di masyarakat, sehingga dapat menyusun strategi deteksi konflik yang kompatibel dan efektif. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam giat pengabdian ini sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebagai mitra kerja sama dalam pelatihan deteksi dini konflik sosial dan keagamaan. Pihak Bawaslu menyurati dan merekomendasikan anggotanya untuk mengikuti pelatihan
2. Pihak kepolisian Polres Kabupaten Kerinci, sebagai narasumber yang memaparkan kondisi sosial keagamaan di Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh
3. Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), tim melakukan komunikasi ke jajaran Kesbangpol untuk mendapatkan data-data mutakhir terkait potensi konflik sosial
4. Ketua dan jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tim melakukan komunikasi ke jajaran pengurus FKUB untuk mendapatkan data-data terkini tentang dinamika keberagamaan di Kerinci dan Sungai Penuh

Sedangkan peserta dalam kegiatan pelatihan deteksi dini konflik terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang berjumlah 30 orang. Keterangan lebih lengkap diuraikan pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Peserta Pelatihan Deteksi Dini Konflik

No.	Nama	Asal Instansi
1.	Sari Mustika	Bawaslu Kota Sungai Penuh
2.	Hamdia Iksan	Panwaslu Sitinjau Laut
3.	Nopan Hamsani	Panwaslu Tanah Cogok
4.	Ulpa Sari Darma	Panwaslu Danau Kerinci Barat
5.	Kemas M. Eka Fhitrah	Panwaslu Air Hangat
6.	Hermanto	Bawaslu Kabupaten Kerinci
7.	Regi Senjaya	Bawaslu Kabupaten Kerinci
8.	Pahrur Razi	Panwaslu Air Hangat Timur
9.	Nugraha Firmansyah	Bawaslu Kabupaten Kerinci
10.	Adrial Ikhwan	Bawaslu Kabupaten Kerinci
11.	Syakrani	Bawaslu Kabupaten Kerinci
12.	Bambang Irwadi	Bawaslu Kota Sungai Penuh
13.	Agustia	Panwaslu Danau Kerinci
14.	Hillmi	Bawaslu Kabupaten Kerinci
15.	JeFrizal	Panwascam Danau Kerinci
16.	Fengki Efniza	Panwascam Depati Tujuh
17.	Wenny Dwi Wulandari. J	Panwascam Sungai Bungkal
18.	Dedi Dora	Panwascam Sungai Penuh
19.	Toni Safriyanto	Bawaslu Kota Sungai Penuh
20.	Nurul Meirintia	Panwaslu Hamparan Rawang
21.	Jusriati	Panwaslu Pondok Tinggi
22.	Joni Haryadi	Panwaslu Tanah Kampung

23.	Isped	Panwaslu Hampan Rawang
24.	Racandra	Panwaslu Kumun Debai
25.	Eca Lestari Wahyuni	Panwaslu Pondok Tinggi
26.	Zul Pikal	Panwaslu Koto Baru
27.	Adrila Sari	Panwaslu Koto Baru
28.	Annisa Gussefar	Panwaslu Kota Sungai Penuh
29.	Angga Arianto	Panwaslu Kumun Debai
30.	Desi Kemala	Bawaslu Kota Sungai Penuh

Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam upaya deteksi dini konflik, analisis strategi diperlukan sebelum masuk tahap pelaksanaan. Dengan melakukan analisis yang cermat, strategi pengabdian dapat dikembangkan secara tepat sasaran, sehingga memungkinkan tindakan yang dilakukan dapat berdampak positif pada masyarakat dan meminimalkan risiko terjadinya konflik yang merugikan. Adapun analisis strategi pengabdian diuraikan sebagai berikut: Pertama, identifikasi peran Bawaslu dalam deteksi dini konflik sosial, Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi pemilihan umum dan mencegah adanya pelanggaran yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, peran Bawaslu diidentifikasi secara jelas dalam strategi deteksi dini konflik sosial selama pemilu. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Anggota Bawaslu perlu dilatih dan diberikan pengembangan kapasitas untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal konflik dan cara untuk mengelola atau mengatasi konflik yang terjadi. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan disertai dengan rencana aksi di tengah masyarakat. Ketiga, peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan lembaga terkait. Keempat, evaluasi dapat membantu memperbaiki strategi deteksi dini konflik dan membuatnya lebih efektif.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan diawali dengan penyajian materi pengantar tentang konflik sosial-keagamaan, dimensi konflik, analisis resiko konflik, dan strategi dekteksi konflik pada masa Pemilu. Materi pelatihan ini didesain secara teoritis dan praktis. Teori-teori tentang konflik dan strategi deteksi konflik disuguhkan sebagai kerangka konseptual dalam memahami penyebab dan dimensi konflik. Sedangkan materi praktis berupa analisis pemetaan konflik, dan kecakapan komunikasi dan mediasi sebagai aspek penting dalam penyelesaian konflik. Penyampaian materi dilakukan secara urut dan sistematis. Setiap materi disampaikan selama 25 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.



Gambar 1. Sesi Pembukaan dan Pengantar Pelatihan



Gambar 2. Pemaparan Materi Dimensi dan Analisis Resiko Konflik.



Gambar 3. Pemaparan Materi Strategi Deteksi Konflik.

Di akhir sesi, pemateri mengarahkan peserta untuk melakukan refleksi dari setiap materi dan mengaitkannya dengan kasus-kasus yang pernah terjadi atau dialami secara langsung di masyarakat. Refleksi ini bagian penting agar peserta mampu memahami konteks, sumber, aktor, dan dampak konflik. Satu per satu peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman mereka ketika berhadapan dengan konflik di masyarakat, lalu pemateri dan peserta lain memberikan tanggapan yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah.



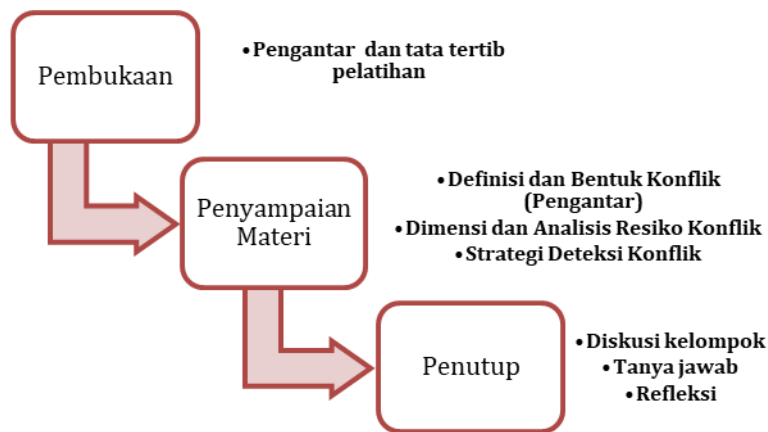
Gambar 4. Diskusi Kelompok dan Sesi Tanya Jawab.

Pelatihan ini didesain dengan pendekatan partisipatif dan kreatif. Partisipasi aktif peserta difasilitasi lewat sesi tanya jawab, refleksi, dan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok para peserta mendapatkan beberapa contoh kasus. Setiap kelompok mendiskusikan akar konflik, aktor yang terlibat, dan solusi penyelesaian sesuai contoh kasus yang diberikan.

Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan memberi kesempatan peserta di luar kelompok untuk memberi komentar. Diskusi kelompok diakhiri dengan penyampaian rangkuman dari pemateri. Bentuk tindak lanjut dari pelatihan, setiap peserta diarahkan untuk membuat laporan berupa analisis potensi-potensi konflik di wilayah tugas, serta memberikan edukasi tentang dampak konflik terutama di masa Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Laporan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak pelatihan berlangsung.



Gambar 5. Foto Bersama Penutupan Pelatihan.



Gambar 6. Proses Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi pelatihan dilakukan dengan pemberian penjelasan kembali secara detail dan curah pendapat. Tujuannya untuk memastikan bahwa peserta memahami dengan baik materi yang disampaikan terkait dengan deteksi dini konflik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan konflik secara efektif. Selain itu, menyediakan lembar evaluasi untuk diisi peserta berkenaan dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Secara keseluruhan, pelatihan ini dirancang untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih responsif terhadap potensi konflik.

KESIMPULAN

Pemilihan umum seringkali memicu potensi konflik lebih tinggi, terutama karena persaingan politik yang sengit dan perbedaan pandangan serta kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat. Untuk mengantisipasi dan merespons potensi konflik tersebut, deteksi dini konflik pada periode pemilu menjadi sangat penting. Memahami kompleksitas dinamika sosial dan politik yang muncul selama pemilu adalah kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana proses demokratisasi dapat berjalan dengan aman, damai, dan adil. Pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas dan wawasan deteksi dini konflik bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten

Kerinci dan Sungai Penuh. Dengan penekanan pada penguatan kapasitas, para anggota Bawaslu dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang indikator-indikator potensi konflik, metode analisis konflik, dan strategi penanganan yang efektif. Melalui pendekatan pelatihan yang partisipatif dan penerapan rencana aksi di tengah masyarakat, diharapkan anggota Bawaslu dapat mengemban peran krusial dalam mengawal dan mengontrol jalannya proses pemilu, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan damai, demokratis, dan mengakomodasi keberagaman pandangan serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya memberikan bekal pengetahuan, tetapi juga memberdayakan anggota Bawaslu untuk berkontribusi aktif dalam menjaga integritas dan keamanan pemilu, menciptakan fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Litapdimas Kementerian Agama RI atas dukungan finansial, LPPM IAIN Kerinci, Kepolisian Resor Kabupaten Kerinci, Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan semua pihak terkait lainnya yang telah memberikan kontribusi signifikan baik moril maupun materil untuk kesuksesan pelaksanaan inisiatif pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., & Kambau, R. A. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Amirullah, M., & Agggariani, D. (2022). Konflik Sosial pada Pilkada di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Relasi Sosial Pasca Pemilihan Bupati 2020). *M a c o r A*, *1*(2). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19203%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/19203/1/MA%27RIF>
AMIRULLAH-FUFP.pdf
- Andriyani, L., Shidqi, R. F. El, & ... (2022). Community Resilience Post-Pilkada Conflict to Supporting Social Sustainability in The Jakarta Area. *Journal of Public* *4*(April), 45–50. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/301%0Ahttps://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/download/301/227>
- Astri, H. (2012). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 151–162. <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2142189-pengertian-konflik-sosial-macam->
- Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. Jossey-Bass.
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, *8*(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Penerbit SMK Grafika.
- Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 29–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>
- Halim, A., & HM, Pahrudin. (2019). The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *27*(2), 353–374. <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>
- Hanan, D. (2020). Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation. *Jurnal Wacana Politik*, *5*(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/326773630.pdf>

- Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A new typology of electoral violence: insights from Indonesia. *Terrorism and Political Violence*, **31**(4), 687–711. <https://doi.org/10.1080/09546553.2016.1277208>
- Herman, A. (2017). Local Press and Interest Conflict at Local Election in Central Sulawesi. **22**(7), 64–74. <https://doi.org/10.9790/0837-2207066474>
- Hui, J. Y. (2020). Social Media and the 2019 Indonesian Elections: Hoax Takes the Centre Stage. *Southeast Asian Affairs*, 155–171.
- Kasmanto Rinaldi. (2022). The Election Conflict of Mandailing Tribe Leader: An Analysis on Victimology. *International Journal of Social Science*, **1**(5), 675–680. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1310>
- Killen, M., Ardila-Rey, A., Barakkatz, M., & Wang, P. L. (2000). Preschool teachers' perceptions about conflict resolution, autonomy, and the group in four countries: United states, colombia, el salvador, and taiwan. *Early Education and Development*, **11**(1), 73–92. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1101_5
- Lesmana, A. C., & Sutrisno, B. (2021). Playing with Identity Politics: An Analysis Post-2019 Presidential Election. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, **15**(2), 236–254. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.23716>
- Peter, W. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War Peace and the Global System*. SAGE Publications. <http://site.ebrary.com/id/10080961>
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, **5**(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>
- Qodir, Z., Jubba, H., & Hidayati, M. (2022). Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan. *Studia Islamika*, **29**(1), 111–142. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.12940>
- Surjo, J., & Qodir, Z. (2013). Gandong Amidst the Religious Conflicts.
- Waisová, Š. (2015). Environmental cooperation and conflict transformation. *Central European Journal of International and Security Studies*, **9**(2), 92–116.